

Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Kota Kotamobagu

Hamdi Gugule^{1*}, Romi Mesra^{2*}

Universitas Negeri Manado¹²

Article Info

Article history:

Received : 24 March 2023

Publish : 27 March 2023

Keywords:

Public Perception,
Development
Implementation,
Kotamobagu City

Article Info

Article history:

Diterima : 24 Maret 2023

Publish : 27 Maret 2023

Abstract

In the implementation of the development that has been going on for 3 (three) years, the leadership of the first elected Mayor/Deputy Mayor of the people, feels the need to do a study of people's perceptions in seeing the implementation of development, both physical development and non-physical development. (planning aspect). The purpose of carrying out this activity is to find out how the public perception of the implementation of development in Kotamobagu City. The data collection techniques are in the form of pre-surveys, field observations, interviews, and questionnaires. The results of the study are the characteristics of respondents, responses to development changes (progress), prominent development classifications, development programs that need to be developed in the future, development of regional economic growth centers and development of modern markets, and order and arrangement of beautiful and green cities

Abstrak

Dalam pelaksanaan pembangunan yang telah berjalan selang 3 (tiga) tahun kepemimpinan Walikota/Wakil Walikota pilihan rakyat yang pertama, merasa perlu dilakukan studi terhadap persepsi masyarakat dalam melihat implementasi pembangunan, baik pembangunan secara fisik maupun pembangunan non fisik. (aspek perencanaan). Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota Kotamobagu. Adapun teknik pengumpulan data berupa pra survey, observasi lapangan, wawancara, dan angket. Hasil penelitian yaitu karakteristik responden, tanggapan terhadap perubahan (kemajuan) pembangunan, klasifikasi pembangunan yang menonjol, program pembangunan yang perlu dikembangkan ke depan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi regional dan pembangunan pasar modern, dan penertiban dan penataan kota indah dan hijau.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Romi Mesra

Universitas Negeri Manado

Email: romimesra@unima.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pendidikan Pelaksanaan kegiatan pembangunan Nasional di Indonesia [1], sesungguhnya merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur [2]. Pencapaian cita-cita tersebut dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dalam bentuk operasional penyelenggaraan pembangunan selaras dengan fenomena dan dinamika yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat [3]. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada pemilihan tujuan yang akan dicapai dengan cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut [4].

Agar proses pembangunan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, maka salah satu aspek yang diperhatikan adalah koordinasi dari para aparat pelaksana pembangunan [5]. Koordinasi [6] sebagai salah satu cara untuk untuk mempersatukan usaha dari setiap penanggung jawab pelaksanaan pembangunan atau unit kerja yang ada disuatu daerah guna menggalakan proses pembangunan terutama pembangunan yang sesuai dengan tuntunan otonomi daerah mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan [7], sehingga tujuan dari pelaksanaan pembangunan pada suatu daerah dapat tercapai [8].

Koordinasi merupakan salah satu yang dapat dilakukan untuk menyelaraskan berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan mulai dari tingkat bawah sampai pada tingkat atas, sehingga terdapat kerjasama yang terarah

dalam usaha mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan [9]. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan memberi instruksi/perintah, mengadakan pertemuan dan memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat [10]. Penetapan mekanisme dalam suatu kegiatan sangat penting untuk mengkoordinasi pekerjaan atau mengorganisasi satu kesatuan yang harmonis [11].

Mekanisme pengkoordinasian dalam pelaksanaan pembangunan untuk tetap mengarahkan aktivitasnya ke arah pencapaian tujuan pembangunan tersebut dan mengurangi ketidak efisienan serta konflik yang merusak [12]. Pengkoordinasian dimaksudkan agar para aparat pelaksana pembangunan mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki [13]. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada kemampuan aparat penanggung jawab pelaksanaan pembangunan untuk menyusun berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai suatu tujuan [14].

Dalam pembangunan dibutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil [15]. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat sehingga kedua belah pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis. Seperti yang diamanatkan dalam UU No. 32/2004, tentang perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi kebawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah, dengan cara ini akan mampu menyerap partisipasi masyarakat hingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat banyak [16].

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan hendaknya memperhatikan berbagai aspek atau hal-hal yang berkaitan, diantaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan [17]. Asumsi para pakar yang berpendapat bahwa semakin tinggi kepedulian atau partisipasi masyarakat pada proses-proses perencanaan akan memberikan output yang lebih optimal [18]. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan akan dicapai [19].

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan indikator utama dan menentukan keberhasilan pembangunan [20]. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat dan pembangunan berencana merupakan dua terminologi yang tidak dapat dipisahkan [21]. Pendapat atau teori tersebut secara rasional dapat diterima, karena secara ideal tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu sangatlah pantas masyarakat terlibat di dalamnya [22].

Menurut Conyers [23], terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam pembangunan, yaitu : Pertama, partisipasi merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut. Ketiga, adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri [24].

Ada beberapa pertimbangan untuk kemudian tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yaitu waktu yang lebih lama [25], serta kemungkinan besar akan banyak sekali pihak-pihak yang menentang pembangunan itu. Definisi partisipasi yang berlaku di kalangan lingkungan aparat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah [26].

Aparatur perencana dan pelaksana menggunakan suatu konsep hirarkis dalam menyeleksi pembangunan pedesaan pada prakteknya. Di dalam proses pembangunan itu terlihat ada satu hal yang terjadi dalam interaksi antara para pelaksana pembangunan dan rakyat, yaitu tentang bagaimana para aparat pembangunan melihat usulan-usulan pembangunan. Dalam pikiran para aparat pelaksana terdapat "hierarki proyek pembangunan" tersebut, dimana proyek yang datang

dari pemerintahan dan proyek yang direncanakan pemerintahan adalah benar-benar proyek yang mencerminkan “kebutuhan rakyat”, dan karena merupakan kebutuhan maka proyek pemerintah itu harus dilaksanakan. Sedangkan apa yang diusulkan oleh rakyat hanya merupakan “keinginan”, bukan mencerminkan hal yang benar-benar harus ada. Karena merupakan keinginan, maka pada umumnya proyek-proyek yang diusulkan oleh rakyat selalu akan diganti dengan usulan-usulan proyek yang digolongkan sebagai proyek “kebutuhan” dan memperoleh prioritas rendah.

Selanjutnya, menurut Soetrisno [27] yang menjadi permasalahan dari segi sosial politik dalam pelaksanaan pembangunannya pada negara sedang berkembang termasuk Indonesia, adalah munculnya suatu gejala dimana pemerintah menempatkan pembangunan bukan lagi sebagai pekerjaan rutin suatu pemerintah, melainkan telah diangkat kedudukannya sebagai suatu ideologi baru dalam negara. Perubahan ini mempunyai segi positif dan negatif. Aspek positifnya adalah dengan dijadikannya pembangunan sebagai suatu ideologi dalam suatu negara, maka pembangunan akan menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintahan dan pelestariannya harus dijaga oleh semua warga negara. Dengan kata lain, pembangunan harus dihayati oleh semua warga negara, seperti kita menghayati ideologi negara. Akan tetapi karena pembangunan telah menjadi sebuah ideologi, maka pembangunan itu telah menjadi sesuatu yang suci sehingga tidak bebas untuk dikritik, lebih-lebih untuk dikaji ulang guna mencari alternatifnya [28].

Di Indonesia pendekatan pembangunan dengan mengikutsertakan warga mulai tumbuh pada awal pelita VI yang ditandai dengan munculnya program-program penanggulangan kemiskinan yang menggunakan pola atau skema tindakan serangan langsung yang lebih substansial terhadap permasalahan [29]. Contoh skema tindakan yang dimaksud antara lain kegiatan-kegiatan seperti pemetaan kantong kemiskinan dan penerapan Inpres Desa Tertinggal.

Ada beberapa tujuan dari keikutsertaan warga secara langsung dalam tindakan program yaitu, Pertama, agar bantuan efektif karena sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak, kemampuan dan kebutuhan sendiri. Kedua, meningkatkan keberdayaan mereka dengan pengalaman dalam melakukan perencanaan, melaksanakan, dan mempertanggung-jawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya [30].

Begitu juga setelah desentralisasi menjadi sebuah keputusan pemerintah, yang artinya peluang potensi daerah membuat semakin besarnya kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Otonomi daerah harus dipandang sebagai peluang untuk keberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah sebaiknya menjadikan momentum ini sebagai peluang untuk dapat memperkuat jaringan dan dapat mengintegrasikan seluruh jaringan dan kelompok sosial yang ada dalam masyarakat ke dalam sebuah wujud kerjasama yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme).

Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana menurut pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004 Kabupaten/Kota pada disebutkan bahwa lingkup kewenangan Pemerintah Daerah terdiri atas [31]:

1. Perencanaan dan Pengendalian Pemerintahan dan Pembangunan
2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum
3. Penanggulangan Masalah Sosial
4. Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan
5. Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
6. Pengendalian Lingkungan Hidup
7. Pelayanan Lingkungan dan Tata Ruang
8. Pelayanan Pertahanan dan Catatan Sipil
9. Pelayanan Dalam Penanaman Modal
10. Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Lainnya
11. Pengembangan dan Pelestarian Budaya
12. Hubungan Harmonis Antara Pemerintah : Induk, Tetangga, Provinsi dan Pusat.

Kecenderungan untuk menerapkan prinsip desentralisasi membuat daerah-daerah lebih

memperhatikan aspirasi masyarakat lokal dalam pembangunan daerah. Fokus perhatian pemerintah (eksekutif) pun mulai memberikan peluang yang sangat besar untuk munculnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Secara eksplisit ditegaskan bahwa penerapan otonomi daerah secara mendasar adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta meningkatkan peran masyarakat. Dalam kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam otonomi daerah mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan hal yang krusial dan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah [32].

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab II pasal 2 ayat 4 disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk [33]:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Undang-undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa salah satu tujuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Artinya adalah bahwa sistem perencanaan pembangunan menekankan pendekatan partisipatif masyarakat atau yang biasa disebut perencanaan partisipatif [34].

Dalam UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bagi daerah terdapat 5 ruang lingkup perencanaan daerah, yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah, yang mana dari masing-masing rencana mensinergikan proses top down - bottom up guna terjadinya sinkronisasi antara masing-masing proses perencanaan [35].

Berdasarkan uraian yang melatari pemikiran di atas maka dalam pelaksanaan pembangunan yang telah berjalan selang 3 (tiga) tahun kepemimpinan Walikota/Wakil Walikota pilihan rakyat yang pertama, merasa perlu dilakukan studi terhadap persepsi masyarakat dalam melihat implementasi pembangunan, baik pembangunan secara fisik maupun pembangunan non fisik. (aspek perencanaan).

2. METODE PENELITIAN

Studi ini pada dasarnya merupakan kajian kebijakan [36], karena hasilnya diharapkan mempunyai implikasi terhadap pelaksanaan program pembangunan di Kota kotamobagu. Secara metodologis penelitian ini bersifat eksploratif kualitatif [37], dalam arti bahwa penelitian ini berupaya menggali dan menemukan sampai sejauh mana dan seperti apa persepsi masyarakat Kota Kotamobagu terhadap pelaksanaan pembangunan 3 (tiga) tahun terakhir. Disamping itu penelitian ini berupaya juga untuk menggambarkan secara detail kondisi-kondisi nyata yang ditemukan dilapangan baik melalui hasil pengamatan maupun melalui kuesioner yang diedarkan kepada responden.

Juga yang dianggap urgen dalam pengumpulan data ini adalah penggunaan metode kualitatif melalui proses penelusuran wawancara kepada para informan guna mendapatkan penjelasan dan pengungkapan menurut hati nurani mereka dan kondisi emik yang mereka rasakan (fenomenologis), terhadap program pembangunan yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan di Kota Kotamobagu. Kajian ini secara sosiologis menggunakan pula metode verstehen dengan tujuan mencari makna terhadap persepsi masyarakat yang berkembang di Kota kotamobagu saat ini.

Teknik pengumpulan data berupa pra survey, observasi lapangan, wawancara, dan angket

[38]. Pra Survey, teknik ini digunakan untuk pengumpulan data awal dilapangan untuk mendapatkan gambaran tentang karakteristik responden dan pola sebaran ditingkat kecamatan dan desa.. Dengan data awal ini akan ditentukan kemudian mengenai langkah-langkah dalam penyusunan prioritas pengumpulan data. Observasi Lapangan, teknik ini digunakan oleh tim penyusun sekaligus tim studi untuk turun secara langsung dilapangan dalam proses pengamatan tentang perkembangan karakter dan permasalahan pembangunan. Tim akan mendatangi sumber-sumber yang dapat memberikan keterangan dan informasi tentang program pembangunan.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung dari informan dan responden yang memahami tentang keadaan dan situasi pembangunan di Kota di Kotamobagu. Angket atau kuesioner adalah daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan variabel dan indikator tentang persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota Kotamobagu. Teknik ini menjadi alat utama pengumpul data dari 160 responden yang tersebar di 32 desa/kelurahan di Kota Kotamobagu.

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang diangkat dalam studi ini, maka analisis yang akan digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pola penafsiran berdasarkan persepsi dari masyarakat. Semua data yang diperoleh dari lapangan khususnya pada kuesioner yang diedarkan akan dikategorikan berdasarkan sifat dan karakter dari substansi pokok penelitian yang kemudian dibuatkan dalam bentuk tabel dan diberikan penafsiran. Disamping itu terhadap data-data yang digali dengan pendekatan eksploratif akan disajikan dalam uraian untuk mendukung penarikan kesimpulan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bagi daerah terdapat 5 ruang lingkup perencanaan daerah, yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah, yang mana dari masing-masing rencana mensinergikan proses top down - bottom up guna terjadinya sinkronisasi antara masing-masing proses perencanaan, yang kemudian diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan.

Manfaat yang diharapkan dari Kajian Persepsi masyarakat terhadap pembangunan di Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan dalam program perencanaan pembangunan kedepan terutama berhubungan dengan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap penyusunan dan implementasi program pembangunan di kota kotamobagu.
- b. Dapat digunakan sebagai pedoman dan rujukan serta pertimbangan dalam menyusun anggaran pendapatan belanja daerah, karena memuat berbagai masukan terhadap perbaikan pembangunan serta arah kebijakan pemerintahan di Kota Kotamobagu
- c. Menjamin adanya perbaikan perencanaan terhadap kebijakan pengembangan pembangunan karena merupakan komitmen pemerintah.serta Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pengembangan pembangunan kota

Setelah melakukan penelitian maka peneliti mendapatkan beberapa temuan berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan Kota Kotamobagu, sebagai berikut:

1. Karakteristik Responden

Responden yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini berjumlah 165 responden yang terdiri dari 5 tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memberikan pandangan sekaligus penilaian terhadap program pembangunan yang dilaksanakan di Kota kotamobagu. Dari aspek keterwakilan perempuan ditetapkan 30% atau sekitar 50 orang sedangkan sisanya adalah responden pria. Dari segi pendidikan responden sebagai besar berpendidikan Sekolah menengah Atas (SMA sekitar 62,2%) sedangkan yang berpendidikan Perguruan Tinggi sekitar 20%, lainnya 17,8% adalah SMP dan sebagian kecil SD.

2. Tanggapan terhadap Perubahan (Kemajuan) Pembangunan

Dari semua responden mengemukakan bahwa terjadi perubahan kemajuan dalam pembangunan secara signifikan dan hal ini menurut responden sangat baik dalam pembangunan di Kota Kotamobagu. Sebagai perbandingan yaitu sebelum adalah pemekaran di kota kotamobagu jalan-jalan yang ada di pusat kota belum ada yang diperbaiki seperti dengan kondisi sekarang ini. Disamping itu sambutan masyarakat terhadap program pembangunan juga termasuk positif, hal ini terlihat dari dukungan terhadap pelebaran jalan tanpa meminta ganti rugi bagi pemerintah.

3. Klasifikasi Pembangunan yang Menonjol

Masyarakat menilai bahwa (100%) pembangunan yang sangat berpengaruh langsung terhadap aktivitas kehidupan bermasyarakat adalah pembuatan jalan. Pelebaran jalan menurut masyarakat sangat memudahkan bagi mereka dalam kegiatan perekonomian dan kegiatan sosial. Disamping itu masyarakat menilai bahwa pembangunan dalam bidang pendidikan dan pembangunan dalam bidang kesehatan terutama dengan beroperasinya Rumah Sakit Umum Kota Kotamobagu yang terletak di Desa Pobundayan, juga termasuk dalam kegiatan yang menonjol dalam pembangunan tiga tahun berjalan pemerintahan Kota kotamobagu.

4. Program Pembangunan yang Perlu dikembangkan ke Depan

Dari keseluruhan responden penelitian menilai mengenai program pembangunan yang akan diimplementasikan kedepan bervariasi yaitu untuk pembangunan bidang pertanian 24,24%, untuk pembangunan pendidikan 36,36%, untuk pembangunan bidang kesehatan 30,30% sedangkan untuk pembangunan bidang lainnya seperti pemberdayaan perempuan. Menyimak jawaban tersebut ternyata bahwa persepsi masyarakat untuk kegiatan pembangunan kedepan lebih cenderung pada bidang pendidikan, kesehatan dan pertanian. Khususnya untuk pertanian berkaitan dengan kedudukan Kota kotamobagu sebagai urban, maka untuk bidang pertanian masih tetap dipertahankan karena dari aspek lingkungan kondisi ini berhubungan dengan terpeliharanya daerah resapan air. Juga dalam tata ruang wilayah Kota Kotamobagu dan RPJPD kota kotamobagu masih ditegaskan bahwa untuk areal pertanian khususnya sawah masih dipertahankan 20 tahun kedepan.

5. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional dan pembangunan Pasar`Modern

Kedudukan Kota Kotamobagu yang diapit oleh empat Kabupaten Bolaang Mongondow raya, sangat menguntungkan secara ekonomi, dan hal ini disadari oleh masyarakat Kota Kotamobagu. Dari seluruh responden, 97 % menyatakan bahwa dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota sangat setuju terhadap pembangunan pasar`modern. Sedangkan 3% menyatakan dipertimbangkan. Dari data tersebut maka proses pembangunan dan pengembangan ekonomi Kota Kotamobagu mendapat dukungan dari masyarakat Kota Kotamobagu..

6. Penertiban dan penataan Kota Indah dan Hijau.

Penertiban dalam keindahan Kota Kotamobagu telah dilaksanakan pada saat Kota kotamobagu mendapat penghargaan adipura dari pemerintah pusat. Untuk penataan ini khususnya yang berkaitan dengan penataan lalu lintas bendor masyarakat mengemukakan sangat setuju. Penataan dimaksud untuk menghindari kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas di pusat Kota. Pemerintah Kota tidak bermaksud untuk menghilangkan jenis kendaraan bendor di Kota Kotamobagu, hanya menata lalu lintas di sektor-sektor jalan tertentu.

Dari keseluruhan tanggapan masyarakat yang berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap pembangunan Kota Kotamobagu 3 tahun berjalan pemerintahan Kota, ternyata disambut positif oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa jawaban yang dikemukakan oleh anggota masyarakat mulai dari pembangunan sarana dan prasarana jalan, jembatan, serta penataan potensi ekonomi masyarakat. Juga yang berkaitan dengan transportasi terutama penataan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Jika dibandingkan kondisi awal Kota Kotamobagu pada saat dimekarkan terdapat perbedaan yang besar tentang pelaksanaan pembangunan. Tanggapan masyarakat mengenai pembangunan

pasar tradisional di Desa Poyowa Becil dan Desa Genggulang pada dasarnya didukung oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi konsentrasi lalu lintas diperkotaan serta terjadi pengembangan potensi secara ekonomi antara Kotamobagu bagian Utara dan Kotamobagu bagian selatan.

Disamping pembangunan secara fisik yang telah dilaksanakan pemerintah Kota juga mempersiapkan berbagai dokumen perencanaan pembangunan di Kota Kotamobagu seperti perencanaan sosial untuk mengantisipasi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan kota, pengangguran serta masalah yang berkaitan dengan adat dan budaya daerah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan tentang persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan Kota Kotamobagu, sebagai berikut: karakteristik responden, tanggapan terhadap perubahan (kemajuan) pembangunan, klasifikasi pembangunan yang menonjol, program pembangunan yang perlu dikembangkan ke depan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi regional dan pembangunan pasar modern, dan penertiban dan penataan kota indah dan hijau.

5. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan pengembangan penelitian berkaitan sejauhmana efektifitas program KKN MBKM ini terutama terhadap masyarakat, sekolah, perkantoran atau dimanapun mahasiswa ditempatkan untuk melakukan kegiatan tersebut.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada keluarga yang telah mensupport saya dalam penelitian artikel ini dan dalam merampungkan artikel ini. Selanjutnya terimakasih kepada tim peneliti mner Romi Mesra yang sangat membantu dalam menyelesaikan artikel ini serta kepada semua mahasiswa yang ikut terlibat dalam penelitian maupun penyelesaian artikel ini.

7. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Y. D. A. Santie, R. Mesra, and R. Rahayu, "THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF RPP BY FIELD PRACTICE TEACHERS (PL) IN THE LEARNING PROCESS AT THE STATE HIGH SCHOOL OF 1 TONDANO," *JUPE J. Pendidik. Mandala*, vol. 7, no. 4, 2022.
- [2] M. Imbar and R. Mesra, "Faktor-Faktor Krusial dalam Manajemen Pembelajaran Sejarah di Masa Pandemi (Studi Pada Jurusan Pendidikan Sejarah Unima)," *J. Ilm. Mandala Educ.*, vol. 8, no. 3, pp. 2174–2184, 2022, doi: 10.36312/jime.v8i2.3672/http.
- [3] Y. D. A. Santie, R. Mesra, and P. R. Tuerah, "Management of Character Education (Analysis on Students at Unima Sociology Education Study Program)," vol. 473, no. Iess, pp. 184–187, 2020, doi: 10.2991/assehr.k.201014.041.
- [4] H. Gugule, R. Mesra, K. K. Peran, P. Pengembangan, P. Masyarakat, and I. Tanaman, "Peran Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Dalam Inovasi Tanaman Coklat Pada Kelompok Tani Di Desa Mopusi Kabupaten Bolaang Mongondow," vol. 7, no. 4, pp. 816–822, 2022.
- [5] Irwan. Romi Mesra. dkk, *PENGANTAR SOSIOLOGI UMUM: Menelusuri Kajian-Kajian Sosiologi*. Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH, 2019.
- [6] R. Mesra, "Patterns Of Social Adaptation of Boarding Students With Local Communities in Gunung Pangilun Village , North of Padang Sub-District , Padang City," 2023.
- [7] F. H. Mamonto and R. Mesra, "Persepsi Mahasiswa FISH UNIMA tentang Implementasi Materi Mata Kuliah dalam Pembentukan Karakter dan di Kehidupan Sosial," vol. 9, no. 1, pp. 382–391, 2023, doi: 10.58258/jime.v9i1.4603/http.
- [8] Y. Daniel, A. Santie, H. Gugule, Y. H. Wenno, R. Mesra, and X. Y. Wood, "Tantangan Mahasiswa Kkn Mbkm Program Studi Sosiologi Unima Dalam Mengajar Di Smas Pgri Rurukan Tomohon Timur," vol. 8, no. 1, pp. 152–157, 2023.
- [9] R. Mesra, E. Erianjoni, and F. Eriyanti, "The social meaning of money in social interaction of boarding students," in *International Conferences on Educational, Social Sciences and Technology*, 2018, no. 1978, pp. 43–50. doi: 10.29210/201816.
- [10] Y. D. A. Santie, R. Mesra, and P. R. Tuerah, "Management of Character Education (Analysis on

- Students at Unima Sociology Education Study Program),” in 3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020), 2020, vol. 473, no. Icss, pp. 184–187. doi: 10.2991/assehr.k.201014.041.
- [11] C. Manoppo, H. Gugule, and Y. D. A. Santie, “Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Putus Sekolah Keluarga Buruh Di Kelurahan Kolongan Akembawi Kecamatan Tahuna Barat,” *J. Paradig. J. Sociol. Res. Educ.*, vol. 1, no. 2, pp. 31–34, 2021, doi: 10.53682/jpsre.v1i2.735.
- [12] M. K. Tupamahu, K. H. Tupamahu, R. Amnah, and R. Rauf, Abd, Mesra, “The Existence and Education of Ceramic Craftsmen Society of Polutan Village in the 4 . 0 Industrial Revolution Era,” *IJECA (International J. Educ. Curric. Appl.*, vol. 5, no. 3, pp. 262–273, 2022.
- [13] R. Mesra, A. Waldi, W. Wijaya, and Y. Melia, “Perilaku Mahasiswa Pendidikan Sosiologi UNIMA Ketika Pembelajaran Online,” vol. 8, no. 3, pp. 2056–2067, 2022, doi: 10.36312/jime.v8i2.3586/http.
- [14] H. G. B and R. Mesra, *Implementation of the Community Development Program in the Mining Circle Community in the East Bolaang Mongondow Regency*, no. 22. Atlantis Press SARL, 2023. doi: 10.2991/978-2-494069-35-0.
- [15] M. F. Hidayat and R. Mesra, “Peran Anak Muda Setempat dalam Budaya Goba-Goba di Nagari Bidar Alam, Solok Selatan,” *Ideas J. Pendidikan, Sos. dan Budaya*, vol. 8, no. 3, p. 1117, 2022, doi: 10.32884/ideas.v8i3.949.
- [16] R. M. Hamdi Gugule, “Studi pemetaan sosial terhadap pengembangan masyarakat sektor pendidikan di desa lingkar tambang kabupaten bolaang mongondow,” *J. Paradig. J. Sociol. Res. an Educ.*, vol. 3, no. 1, pp. 51–58, 2022.
- [17] V. E. T. S. B and R. Mesra, *Social Solidarity Between Fish Sellers in the 66 Bahu Traditional Market Manado City*. Atlantis Press SARL, 2023. doi: 10.2991/978-2-494069-35-0.
- [18] A. S. Romi Mesra, Rus Yandi, Rifka Zuwanda, Basrial Zuhri, “PERSEPSI MASYARAKAT BIDAR ALAM TENTANG PENERAPAN PERDA,” *J. Ilmu Sos. dan Pendidik.*, vol. 6, no. 4, 2022.
- [19] H. Gugule and R. Mesra, “Analisis Sosiologis Terhadap Video Viral Tiktok tentang Penegakan Hukum di Indonesia,” *Ideas J. Pendidikan, Sos. dan Budaya*, vol. 8, no. 3, p. 1071, 2022, doi: 10.32884/ideas.v8i3.956.
- [20] Y. D. A. S. B, R. Fordatkosu, A. R. Umaternate, and R. Mesra, *The Role of the Village Consultancy Board in Infrastructure Development in Fursuy Village , Selaru District , Maluku Tenggara Barat*. Atlantis Press SARL, 2023. doi: 10.2991/978-2-494069-35-0.
- [21] M. I. B and R. Mesra, *Optimizing the Role and Function of Teachers in History Learning in the Time of the Covid 19*. Atlantis Press SARL, 2023. doi: 10.2991/978-2-494069-35-0.
- [22] Y. R. Lembang, L. Maryam, and H. Gugule, “Budaya gotong royong etnis toraja dalam membangun rumah adat tongkonan di lembang bau bullian massa’bu, kecamatan sangalla’, kabupaten tana toraja,” *J. Paradig. J. Penelit. dan Pendidik. Sociol.*, vol. 1, no. 1, pp. 20–24, 2020.
- [23] A. T. Wan, R. A. Conyers, C. J. Coombs, and J. P. Masterton, “Determination of silver in blood, urine, and tissues of volunteers and burn patients,” *Clin. Chem.*, vol. 37, no. 10, pp. 1683–1687, 1991.
- [24] R. Mesra, A. Waldi, R. Rahayu, and M. E. Puteri, “Potensi Konflik Antara Pemilik Lahan dengan Pemilik Hewan Ternak di Nagari Bidar Alam,” *Ideas J. Pendidikan, Sos. dan Budaya*, vol. 8, no. 3, p. 789, 2022, doi: 10.32884/ideas.v8i3.911.
- [25] R. Mesra, R. Yandi, R. Zuwanda, B. Zuhri, and A. Sikumbang, “Persepsi Masyarakat Bidar Alam Tentang Penerapan Perda Kabupaten Solok Selatan No . 1 Tahun 2020 Dalam Mengatasi Konflik Antara Pemilik Hewan Ternak Dengan Pemilik Lahan,” vol. 6, no. 4, pp. 2352–2359, 2022, doi: 10.36312/jisip.v6i4.3706/http.
- [26] F. K. dan H. G. Nikita Maria Fenny Sumarauw, “KENDALA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP KONDISI EKONOMI DI KELURAHAN MAKALONSOUW,” *J. Paradig. J. Sociol. Res. Educ.*, vol. 2, no. 2, pp. 120–124, 2021, [Online]. Available: <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/paradigma/article/view/1690>
- [27] C. Wong, F. Blottner, J. Payne, and M. Soetrisno, “Implementation of a parallel algorithm for thermochemical nonequilibrium flow simulations,” in *33rd Aerospace Sciences Meeting and Exhibit*, 1995, p. 152.
- [28] Z. H. S. B, D. Sengkey, V. E. T. Salem, and R. Mesra, *Parents Perception on Kawasaran Dance in Tondei Village South Minahasa District*. Atlantis Press SARL, 2023. doi: 10.2991/978-2-494069-35-0.
- [29] H. N. Soegiarto and V. Moeljarto, “Debitur potensial di pedesaan Jawa: kasus penerimaan

- masyarakat terhadap aktivitas pelepas uang,” Prism., pp. 55–69, 1994.
- [30] G. Kartasmita, *Pembangunan untuk rakyat: memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. Cides, 1996.
- [31] H. Gugule, R. Mesra, and S. Fathimah, “The Role of Social Media In The Election of Regional Heads in South of Solok,” vol. 02017, pp. 0–3, 2022.
- [32] R. Mesra, M. Lamadirisi, and S. Fathimah, “Fungsi Pasar Sapi/ Blante Bagi Masyarakat Minahasa,” *J. Socius J. Sociol. Res. Educ.*, vol. 8, no. 2, p. 73, 2021, doi: 10.24036/scs.v8i2.227.
- [33] R. Ramadani, “Analisis Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,” *Al-Qanun J. Kaji. Sos. dan Huk. Islam*, vol. 1, no. 4, pp. 402–415, 2020.
- [34] R. Mesra, M. F. Hidayat, V. E. T. Salem, and T. Tanase, “Lecturer Creativity in the Use of Online Learning Media at Manado State University,” *IJECA (International J. Educ. Curric. Appl.)*, vol. 5, no. 3, 2022.
- [35] R. Mesra, “Implementation of Online Learning Via YouTube Media in Unima Sociological Education Study Program,” vol. 01021, 2022.
- [36] M. U. Fithriyyah, “Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru,” *Transparansi J. Ilm. Ilmu Adm.*, vol. 9, no. 2, pp. 154–171, 2017.
- [37] M. Zaemakhrus, “Metode penelitian kualitatif: untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif,” 2020.
- [38] I. W. Suastra, “Model pembelajaran sains berbasis budaya lokal untuk mengembangkan kompetensi dasar sains dan nilai kearifan lokal di SMP,” *J. Pendidik. dan Pengajaran*, vol. 43, no. 2, pp. 8–16, 2010.